

IMBALAN JASA LINGKUNGAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI : STUDI KASUS DI SUMBER JAYA LAMPUNG

S. Suyanto⁹⁾

ABSTRAKSI

Paper ini mengemban tingkat kemiskinan di daerah aliran sungai Way Besar Lampung Barat, dimana pendapatan per kapita per hari adalah Rp. 4,636.- atau masih di bawah garis kemiskinan. Ketergantungan penduduk terhadap sektor pertanian sebagai sumber pendapatan adalah yang besar yaitu sebesar 85 persen, dan hasil dari kebun kopi merupakan penyumbang terbesar dari total pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketergantungan petani pada lahan di kawasan hutan negara sangat tinggi yaitu pendapatan dari kopi di hutan negara adalah sebesar 41% dan pendapatan dari padi di hutan negara adalah sebesar 6%. Petani yang tergolong miskin tersebut sebenarnya mengelola kebun kopi di kawasan hutan negara dengan sistem campuran atau kopi multistrata. Kopi ditanam dengan bermacam-macam pohon kayu-kayuan dan pohon buah-buahan. Dengan sistem campuran ini, dapat mengurangi erosi.

Pengelolaan lahan di daerah hulu sangat penting karena daerah hulu merupakan suatu ekosistem alam yang merupakan suatu reservoir besar yang dapat menampung air hujan, menyaring air tersebut dan kemudian melepaskannya secara gradual sehingga air tersebut dapat bermanfaat bagi manusia. Bila daerah hulu menjadi rusak, seperti terjadinya penggundulan hutan atau pengelolaan lahan yang tidak lestari maka akan menyebabkan banjir dan menurunkan kualitas air

Imbalan atau pembayaran jasa lingkungan merupakan alternative kebijakan guna memperbaiki fungsi DAS dan sekaligus untuk pengentasan kemiskinan. RUPES proyek mencoba mengidentifikasi mekanisme imbalan jasa lingkungan di DAS Way Besar di Sumber Jaya. Paling tidak, ada tiga mekanisme imbalan jasa lingkungan yang mungkin dapat diterapkan yaitu (1). Pemberian hak kelola di kawasan hutan negara (2). Imbalan atas meningkatnya kualitas air bersih bagi masyarakat pengguna air dan (3). Imbalan atas meningkatnya kualitas air sungai bagi PLTA.

Kata Kunci : Fungsi DAS, Imbalan Jasa Lingkungan, Kemiskinan dan Kopi Multistrata Indonesia

⁹⁾ RUPES (Rewarding Upland Poor for Environmental Services they Provide) The World Agroforestry Centre, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah yang banyak dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kewilayahan, Kebangsaan dan Kemiskinan, Gunawan Sumodiningrat mengatakan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2003 tercatat 37,3 juta jiwa atau sekitar 18,98 %. Hal ini dikemukakan pada acara *road show* pengembangan kebijakan beras miskin (raskin) se Nusa Tenggara Barat (NTB). (Kompas Selasa, 12 Agustus 2003).

Penduduk miskin di pedesaan merupakan kelompok yang paling terkena imbas dari proses marginalisasi, berdasarkan data SUSENAS tahun 1999, 76% penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan adalah penduduk pedesaan dan tergantung pada pertanian dan kehutanan sebagai sumber kehidupan mereka (Pradhan et al, 2000).

Kebijakan dalam memperbaiki jasa lingkungan hutan kemungkinan besar akan gagal bila tidak memperhatikan masalah kemiskinan masyarakat di sekitar hutan. Menurunnya kuantitas dan kualitas dari sumberdaya alam akan menyebabkan kemiskinan menjadi lebih parah. Demikian juga sebaliknya, kemiskinan akan menyebabkan makin menurunnya kualitas sumberdaya alam. Persoalan menjadi semakin kompleks dan speertinya tidak berujung pangkal.

Namun demikian saat ini berkembang suatu pemikiran bahwa nilai jasa lingkungan dapat ditingkatkan berbarengan dengan upaya pengentasan kemiskinan melalui imbalan atau pembayaran dari jasa lingkungan yang dihasilkan. Jasa lingkungan yang dihasilkan meliputi fungsi daerah aliran sungai (DAS), penyerapan karbon, keaneka ragaman hayati dan keindahan alam.

1. Imbalan Jasa Lingkungan

Pemikiran dari imbalan atau pembayaran jasa lingkungan didasarkan pada pemikiran bahwa suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam memberikan nilai eksternalitas positif (jasa lingkungan) yang dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat lain. Akan tetapi pasar sering gagal dalam menghargai nilai jasa lingkungan. Kelompok lain tersebut sering menikmati nilai jasa lingkungan itu secara gratis. Misalkan, hubungan antara daerah hulu dan hilir dalam fungsi DAS. Daerah hulu merupakan suatu ekosistem alam yang merupakan suatu reservoir besar yang dapat menampung air hujan, menyaring air tersebut dan kemudian melepaskannya secara gradual sehingga air tersebut dapat bermanfaat bagi manusia. Bila daerah hulu menjadi rusak, seperti terjadinya penggundulan hutan atau pengelolaan lahan yang tidak lestari maka akan menyebabkan banjir dan menurunnya kualitas air.

Akhirnya menyebabkan meningkatkan kerentanan masyarakat hilir sehingga kualitas hidup mereka menjadi terancam. Seyogyanya, masyarakat di hilir juga turut bertanggung jawab terhadap pengelolaan di daerah hulu.

Telah banyak inisiatif di berbagai belahan dunia untuk mengembangkan mekanisme imbal jasa lingkungan terutama di negara maju dan beberapa negara berkembang, terutama di negara-negara Amerika Latin. Di Indonesia mekanisme pembayaran jasa lingkungan belum berkembang dengan baik, namun telah banyak dilakukan inisiatif-inisiatif dalam skala kecil dan dalam tingkatan lokal (Suyanto et al, 2004).

Pada tahun 2002, World Agroforestry Centre (ICRAF) bekerjasama dengan International Fund for Agriculture and Development (IFAD) mendisain suatu program untuk mengembangkan metode yang tepat dalam rangka memberikan imbalan bagi masyarakat miskin atas usaha mereka menyediakan jasa lingkungan – RUPES (*Rewarding Upland Poor for Environmental Services They Provide*). ICRAF mengkoordinasi suatu konsorsium yang terdiri dari berbagai partner yang memiliki ketertarikan atas isu pengembangan mekanisme imbal jasa lingkungan. Partner organisasi dari RUPES Program antara lain adalah Center for International Forestry Research (CIFOR), World Resources Institute (WRI), World Conservation Union (IUCN), Winrock International, Conservation International (CI) the Ford Foundation, The Nature Conservancy (TNC), International Institute for Environment and Development (IIED), Worldwide Fund for Nature (WWF), partner nasional dari negara-negara di Asia, di mana RUPES melakukan *action research* serta investor lainnya

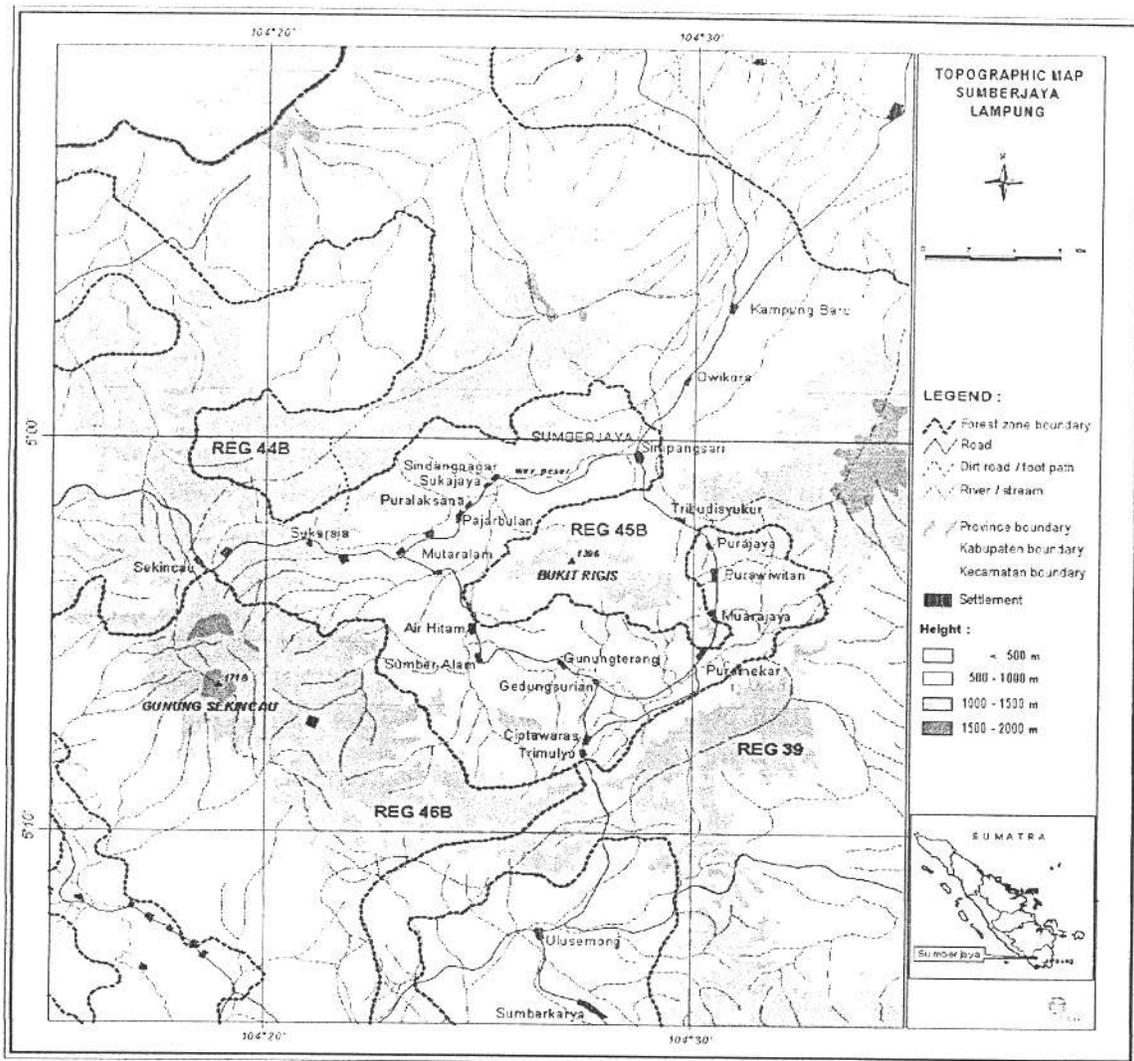
RUPES bertujuan untuk memperbaiki tingkat kehidupan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat miskin di dataran tinggi sekaligus menyokong konservasi lingkungan, baik di tingkat lokal maupun global.

II. SITE RUPES DI INDONESIA.

Sumberjaya di kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu lokasi penelitian RUPES di Indonesia, terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Besai dan merupakan daerah hulu DAS Tulargawang di Kabupaten Lampung Barat. Luas wilayah Sumberjaya (termasuk DAS di dalamnya) adalah 54,194 ha (Gambar 1). Dari areal tersebut menurut klasifikasi TGHK, sekitar 40% merupakan wilayah hutan lindung, 14% adalah taman nasional dan 56% adalah areal penggunaan lain. Sungai Way Besai ini digunakan sebagai sumber air untuk PLTA Way Besai.

Walaupun sebagian besar area DAS Sumberjaya termasuk kedalam katagori hutan lindung dan taman nasional, tetapi sebagian besar penutupan lahannya bukan hutan lagi. Laju deforestasi sangat tinggi, telah terjadi penurunan penutupan hutan secara nyata selama 30 tahun terakhir, yaitu dari 60% pada tahun 1970 menjadi 12% pada tahun 2000. Sementara itu luasan kebun kopi meningkat dari 7% menjadi 70% (Verbist, 2004).

Suku Semendo adalah orang yang pertama kali menempati wilayah Sumberjaya pada sekitar tahun 1937. Saat itu mereka melakukan perladangan berpindah, dimana pada beberapa tahun di awal mereka menanam padi ladang, diikuti dengan penanaman kopi. Jumlah penduduk dan pemukiman di Sumberjaya mulai berkembang bersamaan dengan program transmigrasi khusus yang dikoordinasi oleh Angkatan Darat, Tentara Republik Indonesia, pada tahun 1952 dengan nama program yaitu Biro Rekonstruksi Nasional (BRN). Sejak saat itu, jumlah penduduk semakin meningkat terutama migrant spontan yang berasal dari suku Jawa dan Sunda. Pada tahun 2002, jumlah penduduk mencapai 85.410 orang atau kepadatan penduduk adalah 157 orang per km persegi (BPS, 2002).



Gambar 1. Lokasi Penelitian

Tingginya pertambahan penduduk menyebabkan tekanan terhadap hutan sangat tinggi, laju deforestasi yang sangat tinggi menyebabkan hutan alam yang masih tersisa hanya sekitar 20%. Sekitar tahun 1991 sampai tahun 1996, upaya-upaya penghutan kembali oleh Dinas Kehutanan melalui program penanaman kaliandra yang diikuti dengan dilakukannya pengusiran penduduk di kawasan hutan negara dan pembabatan pohon-pohon kopi. Usaha-usaha tersebut kelihatannya kurang berhasil malahan banyak menimbulkan konflik-konflik sosial dan hutan semakin terdegradasi.

Setelah reformasi, masyarakat merasa lebih kuat dan lebih bebas untuk kembali mengusahakan kebun-kebun kopi di kawasan hutan negara. Namun demikian sebenarnya kebun kopi yang mereka usahakan adalah kebun kopi campuran yang masih bisa memberikan fungsi lindung terutama untuk fungsi DAS. Hal ini merupakan suatu peluang bagi usaha konservasi dan sekaligus untuk pengentasan kemiskinan.